



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RUSLIN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 643200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.135.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4730 m2/40.15 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 721 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 341.737.500

1. MOBIL, NISSAN JUKE MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.300.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 2.437.500

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 702.764.685

F. HARTA LAINNYA Rp. 760.000.000

Sub Total Rp. 5.939.502.185

III. HUTANG Rp. 2.238.225.631

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.701.276.554



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.